



Buletin Parlementaria



Smelter Tembaga Dorong Hilirisasi Sumber Daya Alam Indonesia



5 Yan Permenas
Ajak Masyarakat
Aktif Awasi
Dana Otsus
Papua



9 Komisi III
Perjuangkan
Sarpas Pengadilan
Tinggi dan
Pengadilan Agama
Maluku Utara

Nomor 1236/I/III/2023 • Maret 2023



9 772614 339005



Smelter Tembaga Dorong Hilirisasi Sumber Daya Alam Indonesia



FOTO: BIA/PDT

Wakil Ketua Komisi VI Sarmuji bersama rombongan Tim Kunker Komisi VI meninjau pembangunan Manyar Smelter Freeport di Gresik, Jawa Timur, Jumat (24/2/2023).

Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI Sarmuji meninjau pembangunan Manyar Smelter Freeport yang merupakan fasilitas pemurnian dan pengolahan konsentrat tembaga milik PT Freeport Indonesia yang tengah dibangun di KEK Gresik, Jawa Timur. Dalam tinjauan tersebut, Sarmuji mengapresiasi progres pembangunan smelter peleburan tembaga pertama di Indonesia tersebut yang hingga saat ini sudah mencapai 54 persen.

"Dengan kita melihat tadi, kita diyakinkan oleh perusahaan bahwa pengerjaan smelter ini akan bisa dilakukan tepat waktu meskipun sempat ada penundaan akibat Covid-19, tetapi secara umum ini akan selesai di tahun 2024. Dengan ini kita memiliki kebanggaan bahwa Bangsa Indonesia berhasil melakukan

hilirisasi sumber daya alamnya dan menciptakan nilai tambah yang besar," ujar Sarmuji di Gresik, Jawa Timur, Jumat (24/2).

Lebih lanjut, Sarmuji mengatakan keberadaan smelter tersebut nantinya akan menimbulkan *multiplier effect* yang besar terhadap industri manufaktur. Salah satunya industri baterai motor dan mobil listrik. Dengan adanya smelter tersebut

”

DENGAN INI KITA MEMILIKI KEBANGGAAN BAHWA BANGSA INDONESIA BERHASIL MELAKUKAN HILIRISASI SUMBER DAYA ALAMNYA DAN MENCIPTAKAN NILAI TAMBAH YANG BESAR.

diharapkan dapat menarik investor-investor baru di industri manufaktur sehingga akan dapat mendorong perekonomian khususnya di Jawa Timur.

"Keberadaan Freeport ini akan menunjang industri baterai termasuk untuk mobil-mobil listrik agar lebih cepat direalisasikan oleh pemerintah, dan saat ini pembahasan tentang itu sudah intens dilakukan termasuk bagaimana melakukan subsidi pada motor dan mobil listrik dan sebagainya. Freeport akan bisa menjadi daya ungkit bagi perekonomian Indonesia, khususnya pada ekosistem baterai," jelas Sarmuji.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VI DPR RI Khilmi menyatakan optimis pengerjaan Manyar Smelter Freeport di Gresik akan rampung sesuai dengan target. Dalam tinjauan tersebut, ia juga mengapresiasi perusahaan yang telah menyerap tenaga kerja lokal. "Syukur Alhamdulillah dari paparan Dirut Freeport kan 50 persen tenaga kerja akan diambil dari daerah sekitar dan ditambah 20 persen untuk daerah Gresik, 30 persen dari Jawa Timur dan khususnya di Jawa Timur ditambah dari daerah-daerah yang lain," jelasnya.

Terakhir, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan keberadaan smelter tersebut nantinya diharapkan akan dapat menunjang ekosistem kendaraan listrik yang ada di Indonesia. Adapun pembangunan konstruksi fisik ditargetkan akan rampung pada akhir 2023 dan mulai berproduksi pada Februari 2024 sehingga produksi 100 persen ditargetkan akan tercapai pada Desember 2024. **bia/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya



Ajang Olahraga Internasional Dapat Tingkatkan Pariwisata RI



FOTO: ENO/PDT

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani saat diwawancarai awak media usai menyaksikan F1 Powerboat World Championship 2023 di Sumatera Utara.

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menyebutkan pihaknya menyambut baik gelaran F1 Powerboat World Championship 2023 yang diselenggarakan di Danau Toba, Sumatera Utara (Sumut). Menurutnya, hal ini membuktikan kepercayaan dan pengakuan masyarakat internasional atas kemampuan Indonesia menjadi tuan rumah berbagai acara olahraga bertaraf internasional.

"DPR RI menyambut baik mulai semaraknya kembali berbagai ajang internasional yang diadakan di Indonesia. Penyelenggaraan F1 Powerboat ini menunjukkan kepercayaan dan pengakuan masyarakat internasional atas kemampuan Indonesia menjadi tuan rumah berbagai acara olahraga bertaraf internasional," tutur Puan, Sabtu (25/2).

Lebih lanjut, dalam jumpa

persnya, Puan pun mengingatkan agar Pemerintah terus berupaya melibatkan berbagai UMKM di setiap acara internasional. Puan menilai, pelibatan UMKM dapat memperkenalkan produk lokal nusantara kepada tamu-tamu acara yang datang dari berbagai penjuru dunia.

Puan meyakini, pariwisata Indonesia akan berdampak positif dengan adanya pesta olahraga dunia. Apalagi dalam dua tahun ini, Indonesia telah menjadi tuan rumah sejumlah ajang kejuaraan olahraga internasional seperti balap MotoGP dan World Superbike di Sirkuit Mandalika, serta World Motocross di Sirkuit Rocket Motor Samota. "Tentunya akan mempercepat pulihnya sektor pariwisata Indonesia yang berdampak besar dalam beberapa tahun belakangan akibat pandemi Covid-19," sebutnya.



Buletin
Parlementaria

Smelter Tembaga Dorong Hilirisasi Sumber Daya Alam Indonesia

1 Yuli Permana
Ajak Masyarakat Aktif Rantau Danau Citrus Pagar

9 Komali II
Perjuangan Sarung Pengalihan Tinggi dan Peningkatan Agama Maluku Utara

PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

PIMPINAN PELAKSANA
Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI
Irfan S. Sos, MMSI (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI
Rizka Arinindya, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)
Agus Budi Leksono, S.A.P (Kasubag Analisis Media)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR
Agung Hidayat, S.I.P, Ridwan Budiman, S.I.P, Muhammad Husen

REDAKTUR FOTO
M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI
Fadlun Bariyah, Prima Danutirta, A.Md,
Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI
Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom, Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Nadhen Ivan, S.I.Kom., Ubaid Faurizal, S.I.Kom, Shane Savera Sa diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyawati, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntito Pranowo, Singgih Kinanti Rimmbani, Siti Nadiyah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnricha Firsta Dysie, Balggys Maeshyntha, Anju Alfonso Sitompul, Zulfikar Mubien

FOTOGRAFER
Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Ardhillah, Gerald Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen

ANALIS MEDIA
Supian, S.E, Larissa Amanda Indianti Siahahan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M, Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M, Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widayati, Rosnita, Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciani, Riska Ramadhani

INFOGRAFIS
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN
PIMPINAN PENERBITAN
Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS
Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

IT MEDIA DIGITAL
Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI
Eny Sulistiawati, S.Kom (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Ria Damayanti

ADMINISTRASI
STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunnisa, Made Chrisna Dwipa
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

Scan QR untuk berita selengkapnya



DPR Dukung Digitalisasi Sistem Pembayaran Tol

Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel, menyatakan, digitalisasi sistem pembayaran jalan tol merupakan hal yang baik dan patut didukung. Untuk itu DPR mendukung digitalisasi sistem pembayaran jalan tol ini. Namun harus ada sosialisasi yang baik, pelayanan yang makin baik, serta perlindungan terhadap data pribadi.

Hal itu ia sampaikan setelah mendapat penjelasan dari pimpinan Roatex Ltd, sebuah perusahaan jasa pelayanan sistem pembayaran jalan tol dari Hungaria pada Senin, (20/2). Delegasi DPR RI melakukan kunjungan ke Hungaria, salah satunya menemui manajemen Roatex. perusahaan itu telah memenangkan tender dari Kementerian PUPR senilai 300 juta dollar pada 15 Maret 2021 untuk penerapan digitalisasi sistem pembayaran jalan tol.

Menurut CEO Roatex Ltd Zoltan Varga, sesuai rencana, pada Juni 2023, sistem ini akan diterapkan di Bali. Selanjutnya pada Desember, sistem ini akan diterapkan untuk seluruh jalan tol di Indonesia. Dengan demikian, katanya, jalan tol di Indonesia nantinya tak lagi ada gardu fisik di pintu tol. Selanjutnya, yang ada adalah portal virtual.

Digitalisasi sistem pembayaran jalan tol ini, kata Gobel, akan menciptakan efisiensi sekaligus meningkatkan produktivitas. Hal ini terjadi karena terjadi penghematan dalam operasional jalan tol maupun mengurangi kemacetan di pintu tol. "Mobilitas jadi lebih baik, penggunaan

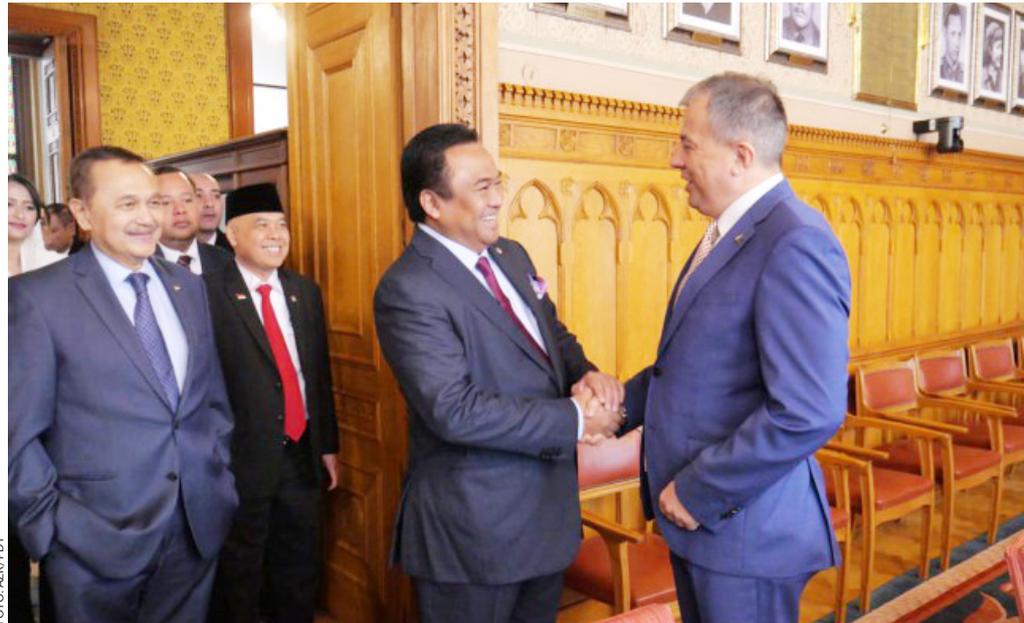


FOTO: AZK/PDT

Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel saat melakukan kunjungan bersama Delegasi DPR RI ke Hungaria.

”

DIGITALISASI SISTEM PEMBAYARAN JALAN TOL INI, AKAN MENCIPTAKAN EFISIENSI SEKALIGUS MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS. HAL INI TERJADI KARENA TERJADI PENGHEMATAN DALAM OPERASIONAL JALAN TOL MAUPUN MENGURANGI KEMACETAN DI PINTU TOL.

bahan bakar menjadi berkurang, dan polusi udara akibat kemacetan pun menjadi berkurang,” sebutnya. Turut hadir dalam delegasi, Anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansyah meminta agar *server* harus ada di Indonesia dan perlindungan data pengguna jalan tol terjamin dan tidak bocor.

Saat ini, panjang jalan tol di Indonesia mencapai 2.578 km dengan 47 konsesi operator. Roatex berharap hingga masa kontrak berakhir panjang jalan tol Indonesia mencapai 6.000 km. Jalan tol di Indonesia dimulai pada 1978 dengan sistem bayar tunai, lalu pada 2017 mulai diterapkan non-tunai melalui penggunaan kartu e-money, dan pada 2023 ini mulai digitalisasi (atau disebut sebagai *Multi Lane Free Flow*) secara penuh. **azk/aha**



Yan Permenas Ajak Masyarakat Aktif Awasi Dana Otsus Papua

Anggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas mengajak masyarakat untuk aktif mengawasi penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua, khususnya pada Tahun Anggaran 2023 ini. Sebab, penggunaan dana tersebut telah diatur secara ketat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

"Saya selaku ketua tim yang memimpin delegasi ke Papua, memaksakan anggaran itu supaya jangan sampai menciptakan raja-raja kecil di Provinsi Papua. Tetapi, (harus) bisa memberikan manfaat besar bagi masyarakat di daerah," katanya, saat diwawancarai **Parlementaria**, di Pulau Kurudu, Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, Selasa (21/2).

Menurutnya, pengawasan dari masyarakat ini perlu agar dana Otsus ini tidak disalahgunakan para pejabat di Papua. Dana tersebut, tegasnya, sepenuhnya adalah untuk kepentingan masyarakat Papua. "Saya harap masyarakat turut mengawasi dana Otsus yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Papua. Tahun ini dananya cukup besar dan langsung diberikan kepada Bupati dan Walikota di Papua," tambah Politisi Fraksi Partai Gerindra itu.

Legislator asal Papua itu menjelaskan bahwa pada Tahun Anggaran 2023, DPR RI telah berupaya memberikan tambahan dana Otsus cukup besar kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Papua. Adapun dana Otsus tersebut lebih difokuskan untuk



FOTO: CAS/PDT

Anggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas saat berbincang dengan masyarakat di Pulau Kurudu, Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, Selasa (21/2/2023).

”

SAYA BERHARAP DENGAN ADANYA ALOKASI DANA OTSUS, MASYARAKAT DAERAH BISA MENDAPATKAN KEBIJAKAN DAN ALOKASI DARI PEMDA UNTUK MEMBANTU PENDIDIKAN DAN KESEHATAN. ITU PALING UTAMA. KARENA ITU ISYARAT DARI PEMERINTAH PUSAT BAHWA TUJUAN OTSUS ADALAH BAGAIMANA MEMBANTU DAN MEMBANGUN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT TERMASUK PAPUA.

alokasi pendidikan dan kesehatan masyarakat Papua.

"Saya berharap dengan adanya alokasi dana Otsus, masyarakat daerah bisa mendapatkan kebijakan dan alokasi dari pemda untuk membantu pendidikan dan kesehatan. Itu paling utama. Karena itu isyarat dari pemerintah pusat bahwa tujuan Otsus adalah bagaimana membantu dan membangun kesejahteraan masyarakat termasuk Papua," harapnya.

Dalam kesempatan yang sama, ia pun turut memberikan perhatian berupa bantuan yang diberikan kepada masyarakat di Pulau Kurudu. Beberapa bantuan tersebut, yaitu pemberian gawai untuk menunjang komunikasi, tas sekolah, seragam sekolah, seragam tim sepak bola dan bola sepak. **cas/rdn**

Scan QR untuk berita selengkapnyanya



Strategi Indo-Pasifik Kanada Diharapkan Perkuat Peran Indonesia dalam Keketuaan ASEAN 2023

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid secara resmi menerima kunjungan kehormatan Anggota Parlemen Kanada/Sekretaris Menteri Luar Negeri Kanada, Maninder Sidhu, di Ruang Tamu VIP Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (24/2). Meutya mengungkapkan, Maninder dalam pertemuan tersebut memperkenalkan mengenai gagasan strategi negara tersebut yakni *Indo Pacific Strategy*.

"Strategi itu tentu akan mempengaruhi bagaimana menjaga keamanan di kawasan serta peningkatan kerjasama di bidang perdagangan dengan Kanada. Beliau sampaikan bahwa Kanada ingin sekali meningkatkan *trade* dengan Indonesia, nah itu yang kita harapkan terjadi. Beliau akan bertemu juga dengan komunitas bisnis dari Indonesia," terang Meutya.

Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut menegaskan *Indo Pacific Strategy* menjadi hal penting bagi posisi Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023 saat ini. "Hal ini yang kita harapkan kerja sama yang lebih baik lagi ke depan di berbagai hal seperti bisnis dan *trade*," tandas Meutya.

Sementara itu, Sekretaris Menteri Luar Negeri Kanada Maninder Shidu mengungkapkan dirinya sangat senang jika Indonesia dan Kanada dapat mengembangkan hubungan erat. "Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, beberapa waktu lalu juga berada di sini (Indonesia) bersama para Menteri Kanada. Hal



Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid saat menerima kunjungan kehormatan Anggota Parlemen Kanada/Sekretaris Menteri Luar Negeri Kanada, Maninder Sidhu, di Ruang Tamu VIP Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (24/2/2023).

ini merupakan ikatan yang dapat membangun kekuatan antara kedua negara kita. Kami juga telah memiliki bisnis kerjasama bersama Indonesia," terang Maninder.

Kerja sama tersebut dilakukan, sambung Maninder, terlebih mengingat Indonesia memiliki posisi sentral sebagai pemimpin di ASEAN.

”

HAL INI YANG KITA HARAPKAN KERJA SAMA YANG LEBIH BAIK LAGI KE DEPAN DI BERBAGAI HAL SEPERTI BISNIS DAN TRADE.

Dengan begitu, secara terbuka Indonesia diharapkan menerima *Indo Pacific Strategy* Indonesia-Kanada yang akan mempengaruhi stabilitas keamanan di kawasan ASEAN. Selain itu, papar Maninder, Indonesia diharapkan juga dapat meningkatkan kerja sama dengan Kanada di berbagai bidang.

Tak hanya itu, *Indo Pacific Strategy*, dijelaskan oleh Maninder, memiliki berbagai tujuan yang dapat dibangun. "Seperti memerangi perubahan iklim secara global, memperkuat ikatan antar manusia, membangun perdagangan, memastikan kedua negara ini saling mendukung melalui peningkatan kapasitas dan infrastruktur berkelanjutan," pungkas Maninder.

pun.ft/rdn

Scan QR untuk berita selengkapnya



Pembebasan Tanah di Kaltim Terkait IKN Masih Ada Masalah

Komisi II DPR RI menanggapi beberapa permasalahan pembebasan lahan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim). Komisi II pun sempat menanyakan langsung pada pertemuan tersebut mengenai permasalahan pembebasan lahan pada lokasi dan wilayah penyangganya.

Khususnya berkaitan dengan pembebasan lahan yang belum selesai. Negara pun diminta tidak sewenang-wenang terhadap rakyat dan tetap mengidentifikasi kepemilikan tanah tersebut. Sehingga, proses peralihan kepemilikan lahan dari masyarakat kepada pemerintah dapat dilaksanakan dengan

lancar tanpa menimbulkan konflik agraria berkepanjangan.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin dalam pertemuan dengan Pemerintah Daerah Kalimantan Timur di Ruang Rapat Walikota Balikpapan, Jumat (17/2) meminta agar masalah pertanahan IKN diagendakan secara khusus. Karena menurutnya, sejak Undang-Undang (UU) IKN ditetapkan hingga saat ini tidak dapat diketahui sejauh mana perkembangannya.

"Undang-undangnya sudah diputuskan, kenapa kita kehilangan jendela dan pintu untuk melihat sejauh mana *progress report*-nya. Ditambah lagi Badan Otorita IKN ini mitranya tidak ada di DPR. Akhirnya kita memantau itu semua hanya lewat berita-berita dan media sosial, tapi itu pun sifatnya informatif, bahkan sebagian

simpang siur," ucap Politisi PKB itu.

Dalam kesempatan yang sama Anggota Komisi II DPR RI Mohamad Muraz mengatakan, Komisi II merasa berkepentingan karena urusan IKN itu yang sampai hari ini belum terlihat progresnya. Ia pun menyontohkan, bahwa Komisi II bermitra dengan BPN yang dinilai pasti mengetahui perkembangan soal proses IKN karena terkait dengan tugas pokok dan fungsinya misal dengan pengadaan lahan dan pemanfaatan tanah. Tapi ketika diperiksa ternyata mata anggaran atau nomenklatur soal tersebut tidak ada.

Lebih lanjut ia menyampaikan yang menjadi masalah pokok dalam sudut pandang tersebut adalah eksistensi tanah masyarakat, tanah adat, tanah ulayat, bahkan ada tanah kesultanan, juga ada tanah swasta dan Hak Guna Usaha (HGU) yang penanganan dan pengelolanya harus diketahui secara pasti. "Bukan berarti negara sewenang-wenang, tentu tidak, tetapi harus mengidentifikasi tanah-tanah itu mana tanah negara, mana juga tanah adat dan mana tanah masyarakat sehingga masing-masing pembebasannya sesuai sistem dan mekanisme hukum yang berjalan," ujarnya.

"Kita kehilangan informasi yang utuh, padahal ini isu publik yang beberapa pihak bertanya ke kita (Komisi II). Kita pun tidak bisa jawab detail. Padahal kita sendiri bertanya-tanya duduk perkaranya seperti apa. Pihak kesultanan bingung, belum lagi tanah adat dayak, ulayat dan masyarakat, jangan sampai hak mereka terampas," tutur Mohamad Muraz lagi. **man/aha**



Balikpapan, 17 Februari 2023

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin (tengah) saat memimpin pertemuan dengan Pemerintah Daerah Kalimantan Timur di Ruang Rapat Walikota Balikpapan, Jumat (17/02/2023).

FOTO: MAN/PDT

Negara Tidak Boleh Kalah dengan Pemegang Modal

Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan menegaskan negara tidak boleh kalah dengan pemegang modal, khususnya pemegang modal tambang di Sulawesi Tenggara (Sultra). Karena itu, menurutnya, Kepolisian Daerah (Polda) Sultra harus membuat peta besar terkait permasalahan tambang yang ada di daerah tersebut. Pemetaan ini penting, mengingat, di Sultra kerap terjadi aktivitas penyimpanan pertambangan.

"Adalah suatu fakta pertambangan di Sulawesi Tenggara itu marak dengan penyimpanan. Makanya kami

meminta kepada Polda untuk bisa mengatasi semua, bagaimana melakukan pemetaan terkait dengan tambang-tambang yang ilegal. kemudian tambang yang hanya IUP eksplorasi, tambang yang IUP-OP (Izin Usaha Pertambangan khusus Operasi Produksi khusus) tapi bermasalah, ini semua harus ada petanya," jelas Arteria saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI ke Polda Sultra, Rabu (22/2).

Untuk itu, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini meminta kepada jajaran Polda khususnya Ditreskrimsus dan Ditreskrumumdirkrim untuk mengambil langkah tegas terhadap perusahaan pertambangan ilegal di wilayah Sultra. Sebab, ia meyakini, jajaran kepolisian pasti berpihak kepada rakyat.

"Petakan di mana wilayah pertambangan mana yang

”

PETAKAN DI MANA WILAYAH PERTAMBANGAN MANA YANG BERMASALAH, PETAKAN DI MANA WILAYAH PERTAMBANGAN MANA YANG BERPOTENSI TERINDIKASI MELAKUKAN PIDANA LINGKUNGAN, PIDANA KEHUTANAN, PIDANA PERTAMBANGAN, PIDANA KORUPSI, PIDANA-PIDANA LAIN.

bermasalah, petakan di mana wilayah pertambangan mana yang berpotensi terindikasi melakukan pidana lingkungan, pidana kehutanan, pidana pertambangan, pidana korupsi, pidana-pidana lain," jelasnya.

Ateria mengatakan, pihaknya akan terus mendukung kerja-kerja kepolisian dalam menertibkan pengusaha-pengusaha tambang ilegal tersebut. Ia pun mengatakan kejahatan pertambangan ini sangat mengerikan, bukan hanya kejahatan terhadap lingkungan hidup, namun juga karena merugikan keuangan atau perekonomian negara. "Tidak hanya merusak lingkungan tapi apa ini akan menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Nah ini merupakan kejahatan serius, yang harus ditangani dengan extraordinary pula," tutupnya. [we/rdn](https://www.welrdn.com)



FOTO: WILU/PDI

Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI ke Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (Polda Sultra), Rabu (22/2/2023).



Komisi III Perjuangkan Sarpas Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Agama Maluku Utara

Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto mengatakan, Komisi III DPR akan memperjuangkan sarana dan prasarana Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Agama Maluku Utara (Malut). Pasalnya, kondisi geografis wilayah yang terpisah-pisah antar pulau menyebabkan banyak kendala, untuk itu mereka sangat membutuhkan transportasi laut.

Tentu hal ini akan sangat menghambat proses peradilan di Maluku Utara. Apalagi kata Didik, kondisi geografis di Malut ini memang sangat berbeda, tidak bisa dijangkau hanya dengan jalur darat. Belum lagi cuaca dan gelombang laut tinggi saat menyebrang antar pulau, bahkan seringkali mereka tidak bisa menyebrang untuk melaksanakan tugas karena cuaca buruk.

"Untuk itu, anggaran-anggaran ini harus kita carikan solusinya, karena keterhambatan peradilan ini pasti akan mengganggu terwujudnya rasa keadilan masyarakat. Kami pasti akan memperjuangkan temuan-temuan ataupun aspirasi ini," ujar Didik saat mengikuti Tim Kunker Reses Komisi III DPR rapat dengan jajaran Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Agama Malut, Ternate, Senin (20/2).

Politisi F-Partai Demokrat menilai, jangan sampai hal-hal dasar yang fundamental seperti ini tidak tercukupi, karena bisa mengganggu rasa keadilan masyarakat.

Bagaimanapun, *political will* dari

pengambil kebijakan termasuk DPR adalah memberikan keadilan ditingkat masyarakat melalui penegakkan hukum khususnya yang direpresentasikan oleh aparat.

Pihaknya juga sempat menanyakan, apakah aspirasi terkait sarpras ini sudah pernah diajukan ke

Mahkamah Agung (MA). Jika sudah, tapi belum ada realisasinya, tentu Didik mengatakan pihaknya akan mengkonfirmasi ke MA.

"Hal ini menjadi penguat kami bahwa fakta di lapangan memang membutuhkan untuk kepentingan publik, bukan hanya untuk kepentingan lembaga saja. Menurut saya pembahasan penambahan anggaran ini harus dipenuhi oleh pemerintah karena untuk kemaslahatan dan pemenuhan hak-hak masyarakat," pungkas Legislator Dapil Jatim IX ini. **— jika/aha**

”

UNTUK ITU, ANGGARAN-ANGGARAN INI HARUS KITA CARIKAN SOLUSINYA, KARENA KETERHAMBATAN PERADILAN INI PASTI AKAN MENGGANGGU TERWUJUDNYA RASA KEADILAN MASYARAKAT. KAMI PASTI AKAN MEMPERJUANGKAN TEMUAN-TEMUAN ATAUPUN ASPIRASI INI.

FOTO:JKA/PDT



Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto saat mengikuti Tim Kunker Reses Komisi III DPR rapat dengan jajaran Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Agama Malut, Ternate, Senin (20/2/2023).

Scan QR untuk berita selengkapnyanya



Jaring Aspirasi Pengguna Kawasan Hutan pada Pertambangan Nikel Sultra

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Rusdi Masse Mappasesu mendorong para pengusaha tambang nikel yang berada di Kendari agar melaksanakan bisnisnya. Sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada, sehingga hasil tambang tersebut dapat dijadikan dan masuk sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Karena dari data dari KLHK banyak pembukaan lahan yang diluar IUP (Izin Usaha Pertambangan)-nya mereka yang berada di kawasan, maka kami mau mendorong supaya ini ada pemasukan buat negara PNBPnya, sehingga perusahaan-perusahaan yang tadinya ini menambang tidak dengan sesuai aturan kita dorong itu untuk bagaimana dia memajukan permohonan SK PP 24 Tentang pengampunan terhadap tambang dan sawit itu, sehingga itu terjadi PNBP untuk pemasukan buat negara," kata Rusdi di Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin, (20/2).

Dalam pertemuan itu berdasarkan data dari Kementerian LHK terdapat 22 perusahaan yang bermasalah, namun yang memenuhi undangan atas pertemuan dengan Komisi IV DPR RI dan KLHK hanya berjumlah 14 perusahaan. Guna menindaklanjuti hal tersebut, Politisi Partai NasDem ini akan memanggil para perusahaan tersebut untuk berdialog di DPR RI di masa sidang yang akan datang.

Dirinya menyayangkan para perusahaan tersebut tidak memiliki



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Rusdi Masse Mappasesu saat melaksanakan pertemuan dengan mitra kerja Komisi IV DPR RI di Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin, (20/2/2023).

itikad yang baik, mengingat pertemuan ini menjadi salah satu ajang sosialisasi program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun, RMS biasa ia disapa mengapresiasi perusahaan yang sudah datang dan hadir, semoga hal ini menjadi langkah awal perbaikan tata kelola pertambangan yang juga tata kelola kehutanan dan pemanfaatannya yang sesuai dan bermanfaat bagi masyarakat dan negara.

Sementara Anggota, Komisi IV DPR RI Alien Mus menjelaskan bahwa adanya pertemuan dengan Gubernur dan jajaran mitra kerja komisi IV DPR RI di Kendari, karena adanya laporan

dari KLHK atas penggunaan kawasan hutan di areal pertambangan Sulawesi Tenggara, dimana para perusahaan ini memiliki izin usaha pertambangan tanpa memiliki izin pelepasan kawasan hutan.

Untuk itu, Alien berharap kepada Kementerian ESDM jika akan mengeluarkan izin pertambangan dapat juga sekaligus merilis izin pinjam pakai kawasan hutan yang diajukan oleh perusahaan tersebut. Jika tidak, menurutnya kerusakan lingkungan akan terus terjadi, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari sektor lingkungan hidup dan kehutanan tidak dapat tercapai.

ndy/aha



Perhutanan Sosial yang Menimbulkan Masalah Lingkungan Jadi Sorotan

Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menyoroti kawasan hutan kayu putih di Grobogan, Jawa Tengah yang menjadi lahan jagung sehingga menimbulkan berbagai masalah lingkungan seperti banjir yang mendapat banyak keluhan dari masyarakat. Sebelumnya kawasan tersebut menampung air untuk menahan laju genangan air.

"Kawasan hutan kayu putih ini secara konservasi menjadi ketahanan air setelah diubah menjadi lahan jagung sehingga dapat menimbulkan bencana banjir

ini banyak menimbulkan keluhan dari warga," ujar Slamet saat ditemui **Parlementaria** saat kunjungan kerja komisi IV DPR RI ke Grobogan, Jawa Tengah pada Jumat (17/2).

Setelah melakukan kunjungan langsung kelapangan ditemui banyak lahan jagung yang semula tumbuhan kayu putih yang dapat juga berguna penahan air agar tidak banjir. Hal ini terjadi karena kurangnya sinergi dari program yang digagas pemerintah dengan masyarakat yaitu perhutanan sosial.

"Setelah kita melakukan kunjungan ke lapangan kondisinya memang seperti itu artinya

perhutanan sosial yang digagas oleh pemerintah belum sinergi dengan masalah lingkungan," ujar Politisi Fraksi PKS ini.

Kedepannya Slamet berharap program perhutanan sosial dapat lebih baik lagi sehingga hutan dapat bisa dirasakan banyak manfaat dan tetap terjaga kelestariannya. "Ini menjadi PR bagaimana hutan tetap terjaga dan masyarakat dapat memanfaatkannya sehingga tidak sepihak saja, hanya pertaniannya yang berjalan tetapi masyarakat mendapatkan dampak banjirnya," tutup Legislator Dapil Jabar IV itu.

pdt/aha



Anggota Komisi IV DPR RI Slamet bersama rombongan saat kunjungan kerja reses komisi IV DPR RI ke Grobogan, Jawa Tengah pada Jumat (17/2/2023).

Scan QR untuk berita selengkapnya



FOTO: PDT

Pembangunan Infrastruktur di DOB Papua Selatan Harus Didesain untuk Jangka Panjang



FOTO:SSB/PDT

Anggota Komisi V DPR RI Sri Rahayu saat melakukan rapat di Kantor Bupati Merauke, Papua Selatan dalam rangka Kunjungan Kerja Reses, Jumat (17/2/2022).

Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI mendiskusikan soal pembangunan berkelanjutan pada Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Selatan. Diskusi yang melibatkan segenap unsur mitra kerja Komisi V serta pemerintah daerah setempat ini memberikan perhatian khusus pada pembangunan infrastruktur.

Anggota Komisi V DPR RI Sri Rahayu menekankan kepada Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) agar mendesain pembangunan DOB Papua Selatan secara berkelanjutan. "Saya tertarik dengan BPIW yang menyusun

program bagaimana pembangunan infrastruktur provinsi ini ke depan. Pembangunan tidak hanya untuk satu tahun atau dua tahun tapi untuk jangka panjang," papar Sri saat diwawancarai **Parlementaria** usai rapat di Kantor Bupati Merauke, Papua Selatan, Jumat (17/2).

Provinsi Papua yang dimekarkan, pada DOB Papua Selatan dan provinsi baru lainnya dibutuhkan persiapan dan perencanaan pembangunan infrastruktur dan transportasi yang terencana. Politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan ini menegaskan agar pembangunan infrastruktur di DOB Papua Selatan terintegrasi dan terkoneksi.

"Karena itu menurut saya mumpung ini provinsi baru sehingga kita dalam merencanakan kemudian merealisasi itu tahapan-tahapannya harus jelas. Supaya pembangunan ini tidak sepotong-sepotong, terintegrasi dan terkoneksi," tandas Sri.

Dalam kunjungan ini, Tim Komisi V juga meninjau langsung Pelabuhan Laut Merauke dan Pelabuhan Kelapa Lima. Selama agenda kunjungan, tim Komisi V didampingi Bupati Merauke, Romanus Mbaraka, Wakil Bupati Merauke dan perwakilan dari Pemerintah Provinsi Papua Selatan.

ssb/aha



Legislator Dorong Penguatan Anggaran untuk Pembangunan Infrastruktur di Luwu Utara

Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Fauzi mendorong pemerintah pusat segera mengucurkan anggaran untuk membenahi dampak banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, terutama perbaikan infrastruktur yang mengganggu perekonomian daerah.

Diketahui, perbaikan di Kabupaten Luwu masih terus dilakukan meski sudah 2 tahun berlalu. Untuk itu, Fauzi meminta keberpihakan anggaran dari pemerintah pusat serta meminta pemerintah daerah untuk segera melakukan Rancangan Bangun Rinci alias *Detail Engineering Design* (DED).

"Karena ini berkaitan dengan kelayakan serta keselamatan bersama, kami meminta pemerintah pusat untuk memberikan dukungan anggaran. Dan kepada Kementerian PUPR serta Kementerian Perhubungan kami minta untuk terus berkoordinasi dengan pemda dalam penanganan perbaikan ruas jalan untuk mempercepat pemulihan sektor ekonomi serta pembangunan hunian tetap yang menjadi prioritas masyarakat," ujarnya dalam kunjungan kerja di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Jumat (17/2).

Dalam kunjungan itu, pihaknya (Komisi V) juga



FOTO: UEI/PDT

Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Fauzi saat mengikuti kunjungan kerja di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Jumat (17/2/2023).



ASPIRASI YANG KAMI TERIMA TERKAIT PEMBENAHAN INFRASTRUKTUR AKAN KAMI TINDAKLANJUTI DAN SEGERA KAMI KOORDINASIKAN SAAT RAPAT KERJA. INI PENTING AGAR TERJADI PERBAIKAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN TERSEBUT SEGERA DIMANFAATKAN OLEH MASYARAKAT (RAKYAT).

melakukan kunjungan lapangan ke Desa Radda, salah satu desa yang terdampak banjir bandang. Disana, lanjut Fauzi, berbagai aspirasi yang disampaikan baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat. Dikatakan Fauzi, semua aspirasi yang disampaikan itu akan ditindaklanjuti saat komisi V DPR melakukan rapat kerja.

"Aspirasi yang kami terima terkait pembenahan infrastruktur akan kami tindaklanjuti dan segera kami koordinasikan saat rapat kerja. Ini penting agar terjadi perbaikan perekonomian dan pembangunan tersebut segera dimanfaatkan oleh masyarakat (rakyat)," tegasnya. upi/aha



Penyelenggaraan Ajang F1 Powerboat, Kolaborasi dan Sinergi BUMN Perlu Ditingkatkan

Anggota Komisi VI DPR RI Muslim menekankan bahwa kolaborasi antar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam proyek-proyek strategis negara, juga termasuk penyelenggaraan acara internasional, sangat diperlukan. Khususnya dalam penyelenggaraan ajang lomba perahu motor internasional atau F1 Powerboat (F1H2O) di Danau Toba, Sumatera Utara (Sumut).

"Dengan kolaborasi BUMN-BUMN ini betul-betul menjadikan acara ini pula jadi perhatian dunia, kita berharap berjalan sukses. Sebab sukses kegiatan dan pelaksanaannya maka sukses pula yang dirasakan masyarakat di Sumut ini," ungkap Muslim ditemui usai pertemuan dengan Kementerian BUMN dan BUMN terkait di Toba, Sumut, Sabtu (25/2).

Lebih lanjut, Muslim mengatakan bahwa dampak yang diharapkan bagi masyarakat ialah pertumbuhan aspek ekonomi dan sosialnya setelah penyelenggaraan acara berlangsung selama dua hari kedepan, 25-26 Februari 2023. Misalnya pengembangan sektor UMKM usai gelaran lomba serta percepatan pembangunan infrastruktur di sekitar Danau Toba.

"Kalau serius dan konsisten pasti berdampak positif bagi warganya," sebut Muslim. Danau Toba diketahui mencakup beberapa kabupaten dan jadi sarana konektivitas antar warga di masing-masing wilayah. Adapun beberapa BUMN yang mengadakan pertemuan dengan Komisi VI kali



Anggota Komisi VI DPR RI Muslim saat pertemuan dengan Kementerian BUMN dan BUMN terkait di Toba, Sumut, Sabtu (25/2/2023).

”

DENGAN KOLABORASI BUMN-BUMN INI BETUL-BETUL MENJADIKAN ACARA INI PULA JADI PERHATIAN DUNIA, KITA BERHARAP BERJALAN SUKSES. SEBAB SUKSES KEGIATAN DAN PELAKSANAANNYA MAKA SUKSES PULA YANG DIRASAKAN MASYARAKAT DI SUMUT INI.

ini ialah PT ASDP, PT Pertamina dan PT Telkom mengatakan siap meningkatkan layanannya masing-masing.

Terkait konektivitas, penyedia angkutan air PT ASDP berkomitmen meningkatkan pelayanan armadanya dan membuat kantor cabang di area danau. Sedangkan PT Pertamina sebagai perusahaan pelat merah bergerak di bidang bahan bakar, akan memastikan suplai bahan bakar selalu tersedia dan terus ditingkatkan. Sementara PT Telkom akan menambah peralatan telekomunikasinya untuk mengurangi blank spot di beberapa cakupan di Danau Toba.

aha



Kunjungi DIY, Komisi VI Tuntaskan Kredit Macet UMKM Korban Gempa 2006

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima berkomitmen tuntaskan

persoalan kredit macet Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) korban gempa bumi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2006.

Untuk diketahui, gempa bumi yang melanda Jogja pada tanggal 27 Mei 2006 menimbulkan korban jiwa dan kerugian harta benda yang sangat besar, salah satu yang terkena dampak yaitu para pelaku UMKM.

Kerusakan dari dampak gempa bumi mengganggu kinerja dan kelangsungan usaha bagi UMKM yang memiliki kewajiban kredit di bank.

"Hari ini kita selesaikan Rp1,8 miliar, terdiri dari 22 nasabah yang pinjam di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) akan kita lunasi. Tadi sudah disampaikan bahwa ini perintah berdasarkan Raker dengan Menteri BUMN pada waktu itu disepakati di Rapat Komisi IV. Maka sebagai keputusan rapat hari ini, kita tuntaskan. Nanti *follow-up* nya akan dikawal oleh Dinas Koperasi dan UKM bersama tim BUMN yang ditunjuk," jelas Aria Bima usai memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR ke DIY, Rabu (23/2).

Berdasarkan Rapat Kerja sebelumnya di tahun 2011, Komisi VI bersama Menteri BUMN, Menteri Koperasi dan UKM serta Gubernur DIY menyatakan seluruh persoalan kredit macet selesai hapus tagih dan hapus buku di sejumlah Bank Himbara (Himpunan Bank Negara). Namun, hingga saat ini persoalan kredit macet yang belum terselesaikan merupakan nasabah di bank BPR.



FOTO: TRA/PDT

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke DIY, Rabu (23/2/2022).

"Secara umum sudah terselesaikan. Hanya tinggal teknisnya saja untuk pencairan dan seterusnya. Karena ini kan tidak bisa awut-awutan, jangan sampai nanti diberikan pada orang yang bukan berhak. Inshaallah dalam satu atau dua bulan ini selesai," tandas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.

”

SECARA UMUM SUDAH TERSELESAIKAN. HANYA TINGGAL TEKNISNYA SAJA UNTUK PENCAIRAN DAN SETERUSNYA. KARENA INI KAN TIDAK BISA AWUT-AWUTAN, JANGAN SAMPAI NANTI DIBERIKAN PADA ORANG YANG BUKAN BERHAKNYA.

Sebelumnya pada kesempatan yang sama, Staf Khusus III Kementerian BUMN RI Arya Sinulingga mengatakan, terkait persoalan kredit macet UMKM korban gempa tahun 2006, pihaknya akan menangani dan menyelesaikan persoalan tersebut dengan cepat sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang berlaku.

"Kami sudah secara *clear* sampaikan ke Pak Erick Thohir. Lalu Pak Menteri BUMN itu minta persoalan kredit macet yang tersisa ini ditangani dengan cepat. Nanti kita akan lihat bagaimana cara bantuan pendanaan itu sesuai dengan GCG, mudah-mudahan tidak lama. Kita komitmen selesaikan, ditangani secepatnya karena tim saya juga sebelumnya sudah turun ke lapangan untuk survei, diskusi, dan sebagainya kita akan selesaikan," imbuhnya.

tra/rdn

Scan QR
untuk berita
selengkapnyanya



Rudi Hartono Minta Peta Jalan PLTU Fokus di Wilayah yang Kurang Pasokan Listrik

Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI meninjau langsung progres pembangunan PLTU

Unit 2 1000 MW, Cirebon, Jawa Barat. Dalam kunjungan ini Komisi VII bersama mitra kerja yakni PT Cirebon Electric Power Cirebon dan PT PLN membahas perihal kemungkinan dipensiun dini kan PLTU Unit 1 660 MW, setelah PLTU 1000 MW beroperasi. Anggota Komisi VII DPR RI Rudi Hartono Bangun menilai bahwa seharusnya rencana pembangunan PLTU harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, agar tidak sia-sia.

"Arahan pemerintah untuk membuat pembangkit yang *green energy* sebenarnya baik ya, jadi dari sisi analisa lingkungan dampak-dampaknya itu jadi tidak terkena ke masyarakat. Tapi satu sisi harus dilihat di Jawa ini kan daya listrik sangat banyak, beda dengan Sumatera Utara misalnya yang sering mati lampu gitu kan, kekurangan energi. Apakah tidak sebaiknya planning pembangunan pembangkit itu diutamakan ke pulau Sumatera dulu, sehingga tidak sia-sia ada pembangkit yang sudah berjalan masih usia remaja, tapi di pensiunkan," ungkap Rudi saat mengunjungi PLTU 1000 MW Cirebon dalam rangka Kunjungan Kerja Reses Komisi VII ke Jawa Barat, Jumat, (17/2).

Rudi Hartono menjelaskan bahwasanya pembangunan PLTU baru dan mematikan PLTU yang



FOTO:SYN/PDT

Anggota Komisi VII DPR RI Rudi Hartono saat mengunjungi PLTU 1000 MW Cirebon dalam rangka Kunjungan Kerja Reses Komisi VII ke Jawa Barat, Jumat, (17/2/2023).

usia nya masih remaja di Pulau Jawa, terkesan membuang investasi belaka. Sehingga perlu dipertimbangkan ulang mengenai roadmap dalam pembangunan PLTU.

”

NAH ITU YANG TADI YANG SAYA PERTANYAKAN KEPADA PIHAK KEMENTERIAN SDM DAN PIHAK PLN GITU AGAR *PLANNING*-NYA SEBENARNYA HARUSNYA DI SUMATERA.

"Nah itu yang tadi yang saya pertanyakan kepada pihak Kementerian SDM dan pihak PLN gitu agar *planning*-nya sebenarnya harusnya di Sumatera. Ini investasi kan yang *green* (energi) di sini, (Di Jawa) juga termasuk pembangkit surplus energi, ini yang harus dipikirkan ulang. Jadi yang pertama kita harus memberikan suplai energi ini ke seluruh wilayah dari Sumatera sampai Papua. Jawa ini surplus. Jadi pikirkan juga yang belum punya energi gitu kenapa di sini di apa di tempat-tempat terus uangnya dibuang-buang kemari (Jawa) ya," pungkas Politisi Partai NasDem ini.

syn/aha

Scan QR untuk berita selengkapnyanya



Endang Harap Program Kemensos Sentuh Masyarakat & Tepat Sasaran

Anggota komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti berharap program Kementerian Sosial kepada penyandang disabilitas, lansia dan anak-anak yatim langsung menyentuh kepada masyarakat dan tepat sasaran. Demikian disampaikan Endang kepada Parlemen saat pertemuan tim Kunker Reses Komisi VIII DPR dengan sekjen Kemensos, kepala BPKH, serta Asisten Administrasi umum Provinsi Kaltim beserta jajaran, Balikpapan, Jumat (17/2).

”

KITA BERHARAP BANTUAN-BANTUAN PROGRAM YANG MEMANG ITU MENJADI AMANAT UNDANG-UNDANG FAKIR MISKIN DAN ANAK TERLANTAR HARUS MENJADI GARDA DEPAN PEMERINTAH BAHWA KEHADIRAN NEGARA HADIR DI SITU MELALUI PENGANGGARAN, URGENSINYA UNTUK KEMANFAATAN DAN KEMASLAHATAN UMAT.



FOTO: AFR/PDT

Anggota komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti saat menyerahkan bantuan usai pertemuan tim kunker reses komisi VIII DPR dengan sekjen Kemensos, kepala badan BPKH, serta Asisten Administrasi umum Provinsi Kaltim beserta jajaran, Balikpapan, Jumat (17/2/2023).

"Kita berharap bantuan-bantuan program yang memang itu menjadi amanat undang-undang fakir miskin dan anak terlantar harus menjadi garda depan pemerintah bahwa kehadiran negara hadir di situ melalui penganggaran, urgensinya untuk kemanfaatan dan kemaslahatan umat," kata Endang.

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menambahkan, maksud dan tujuan kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR RI ke Balikpapan sekaligus ingin mengevaluasi sejauh mana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam penyaluran bantuan dari pusat baik secara efektivitas dan daya guna.

Seperti, apakah dana perimbangan salah satunya Dana Alokasi Khusus (DAK) memang ada *multiplier effect*, sehingga akan menjadikan pertimbangan oleh komisi VIII DPR di masa mendatang. "Kita ingin jawaban dari pemerintah Kalimantan Timur bahwa nilai bantuan yang diberikan kepada mereka memang ada manfaat yang sangat signifikan karena ada dana alokasi khusus yang memang nilai pemanfaatannya tidak sesuai dengan tujuan harapan Komisi VIII makanya kita ingin melihat sejauh mana yang ada di Kaltim," pungkas Endang. **— afr/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya



Kunjungi Puskesmas Sota, Komisi IX Akan Perjuangkan Nakes Daerah Perbatasan



FOTO: SKR/PDT

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena bersama rombongan Tim Kunker Reses Komisi IX DPR RI saat mengunjungi Puskesmas Sota, Merauke, Papua Selatan, Jumat (17/2/2023).

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena memberikan apresiasi atas layanan yang diberikan oleh Puskesmas Sota, Merauke, Papua Selatan. Tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat Indonesia namun juga Puskesmas Sota memberikan layanan terhadap masyarakat Papua Nugini yang mengalami berbagai permasalahan kesehatan di daerah perbatasan.

"Tentunya, dengan pekerjaan mereka yang ekstra semacam ini, mengurus berbagai hal yang juga ternyata bukan cuma dari dana yang ada, tapi juga menyita energi dan biaya yang mereka miliki sendiri. Tentunya, kami akan membahas dengan Kemenkes untuk mencari apakah ada semacam insentif

atau penghargaan kepada teman-teman nakes yang bekerja di daerah perbatasan negara seperti di Puskesmas Sota ini," ungkap Melkiades, usai mengunjungi Puskesmas Sota, Merauke, Papua Selatan, Jumat (17/2).

Menurut Melki nakes yang sudah bekerja perlu mendapatkan sebuah penghargaan dari negara. "Tentunya, ini akan kita carikan mekanismenya, regulasinya yang tepat sehingga nanti bisa memenuhi aspirasi yang disampaikan nakes yang ada di Puskesmas Sota," ungkapnya.

Sementara, terkait fasilitas kesehatan yang ada di Puskesmas Sota, Melki mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan Kemenkes agar puskesmas mendapatkan Lab Ultrasonography (USG) yang akan berguna nakes dalam memeriksa perkembangan janin yang dikandung oleh ibu hamil tersebut.

"Memang USG ini rencananya akan diberikan kepada seluruh puskesmas di Indonesia, termasuk yang di Sota ini. Memang ini soal waktu saja, tapi tahun ini dipastikan pasti akan terkirim ke berbagai puskesmas termasuk Puskesmas Sota," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyampaikan bahwa sangat sulit mencari tenaga kesehatan yang mau ditempatkan di daerah perbatasan seperti di Puskesmas Sota yang berbatasan langsung antara Indonesia-Papua Nugini. "Kita apresiasi mereka (nakes) yang mau ditempatkan di daerah perbatasan ini, kesejahteraan mereka juga harus lebih diperhatikan agar mereka juga bisa nyaman dalam memberikan pelayanan," tutup Nurhadi.

skr/aha

Scan QR untuk berita selengkapnya



Komisi IX Dorong Percepatan Fasilitas Kesehatan RSUD Komodo Jelang KTT ASEAN

Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene mendorong percepatan pengadaan fasilitas kesehatan untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Komodo yang sedang ditingkatkan menjadi rumah sakit bertaraf internasional di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.

"Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sedang merampungkan pembangunan sejumlah infrastruktur di RSUD Komodo yang dipersiapkan menjadi rumah sakit internasional untuk mendukung Labuan Bajo sebagai destinasi wisata super prioritas sekaligus menjelang perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN bulan Mei ini," tandas Felly, saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI dengan Bupati Manggarai Barat dan jajarannya serta didampingi perwakilan mitra kerja Komisi IX DPR RI di Aula Bupati Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Jumat (17/02).

Politisi Fraksi Partai Nasdem ini menambahkan, kehadiran rumah sakit bertaraf internasional sangat dibutuhkan di Labuan Bajo yang merupakan daerah tujuan wisata super premium. Pihaknya berharap pemerintah daerah dapat menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni dan terampil di bidang kesehatan. Peralatan kesehatan yang lengkap dan modern jika tidak didukung SDM yang mumpuni maka akan sayang sekali dan ini menjadi perhatian.

"Kita juga berharap keberadaan



FOTO: OJI/PDT

Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI di Aula Bupati Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Barat, NTT.

RSUD Komodo bertaraf Internasional Labuan Bajo bisa menerima pasien BPJS Kesehatan, bukan hanya untuk kalangan turis pariwisata (golongan tertentu) saja yang menggunakan," imbuh Legislator Dapil Manado, Sulawesi Utara ini.

Felly menilai daerah wisata super premium seperti Labuan Bajo yang banyak dikunjungi wisatawan dari berbagai negara harus didukung dengan fasilitas kesehatan yang memadai. Karena itu, Komisi IX dorong agar Labuan Bajo segera memiliki rumah sakit bertaraf internasional. Kementerian Kesehatan pun didorong untuk melakukan percepatan pembangunan berbagai infrastruktur RSUD Komodo serta menyiapkan fasilitas peralatan medis yang lebih memadai sehingga rumah

sakit milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat itu bisa segera ditingkatkan menjadi rumah sakit bertaraf internasional.

Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian Kesehatan yang telah membangun RSUD Komodo serta dukungan dari Komisi IX DPR RI selama ini dalam peningkatan fasilitas kesehatan di Manggarai Barat. Kehadiran RS tersebut tidak hanya meningkatkan pelayanan kesehatan di Labuan Bajo, namun juga mendukung sektor pariwisata di Labuan Bajo sehingga meningkatkan tingkat kepercayaan para wisatawan baik domestik dan mancanegara yang akan berlibur di Kabupaten Manggarai Barat. oji/rdn



Hetifah Tekankan Pemerintah Daerah dan Kementerian Harus Berkolaborasi untuk Pendidikan

Kompetensi guru merupakan aspek yang harus ditunjang oleh pemerintah guna menciptakan kualitas yang terbaik pada sektor pendidikan di Indonesia. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menegaskan harus adanya kolaborasi antara Kemendikbud Ristek, Kemenpan RB, Kemendagri dan juga kementerian terkait untuk memenuhi kompetensi guru.

Salah satu diantara kolaborasi yang dimaksud yaitu penerapan

kurikulum 'Merdeka Belajar' yang lebih komprehensif, kesejahteraan guru serta penyelenggaraan pendidikan vokasi yang saat ini masih terkendala.

"Seperti yang kita tahu bahwa pendidikan vokasi akan banyak guru yang pensiun. Ya, kita tentunya harus mengantisipasi karena saat ini pendidikan vokasi sedang digencarkan, jadi ada harapan nanti mungkin bukan hanya Kemendikbud Ristek ya, tapi juga harus didorong oleh Kemenpan RB yang di-support oleh Kemendagri dan berbagai

Kementerian terkait lainnya.

Agar kebutuhan guru vokasi bisa terpenuhi," jelas Politisi Partai Golkar tersebut usai memimpin Kunjungan Kerja Reses di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (17/2).

Terkait proses pengangkatan guru honorer menjadi PPPK, disampaikan Hetifah, hingga saat ini masih terkendala beberapa masalah. Bukan hanya di Sumatera Selatan saja, tapi di daerah-daerah lain mengalami hal yang sama. Masalah yang ditemukan komisi pendidikan terkait PPPK akan menjadi bahan pertimbangan untuk perbaikan kebijakan di tahun 2023.

"Dalam praktiknya ada beberapa permasalahan atau hal-hal yang belum tuntas. Misalnya tadi sudah memenuhi *passing grade* tapi masih belum diangkat menjadi PPPK dan sebagainya. Inilah yang menjadi masukan bagi kami Komisi X tentu saja selain dari Sumatera Selatan ini kita juga akan kompilasi berbagai persoalan dari daerah-daerah lain dan menjadi bahan pertimbangan kami untuk memperbaiki kebijakan di Tahun 2023," terang Hetifah.

Legislator Dapil Kaltim itu berharap sinergi antara pemerintah dengan DPRD dan juga dinas terkait dalam membangun sektor pendidikan terus ditingkatkan untuk mencapai target yang diharapkan. Selain itu, kunjungan kali ini juga membicarakan soal perpustakaan yang berkaitan dengan Dinas Pendidikan. Ia pun mendorong agar sinergi dan kolaborasi diutamakan dalam memajukan perpustakaan tersebut. **aar/aha**



FOTO: AAR/PDT

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian saat memimpin Kunjungan Kerja Reses masa Sidang III tahun 2022-2023 di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (17/2/2023).

Scan QR untuk berita selengkapnya



Indonesia Harus Segera Benahi dan Memajukan Sektor Pariwisata

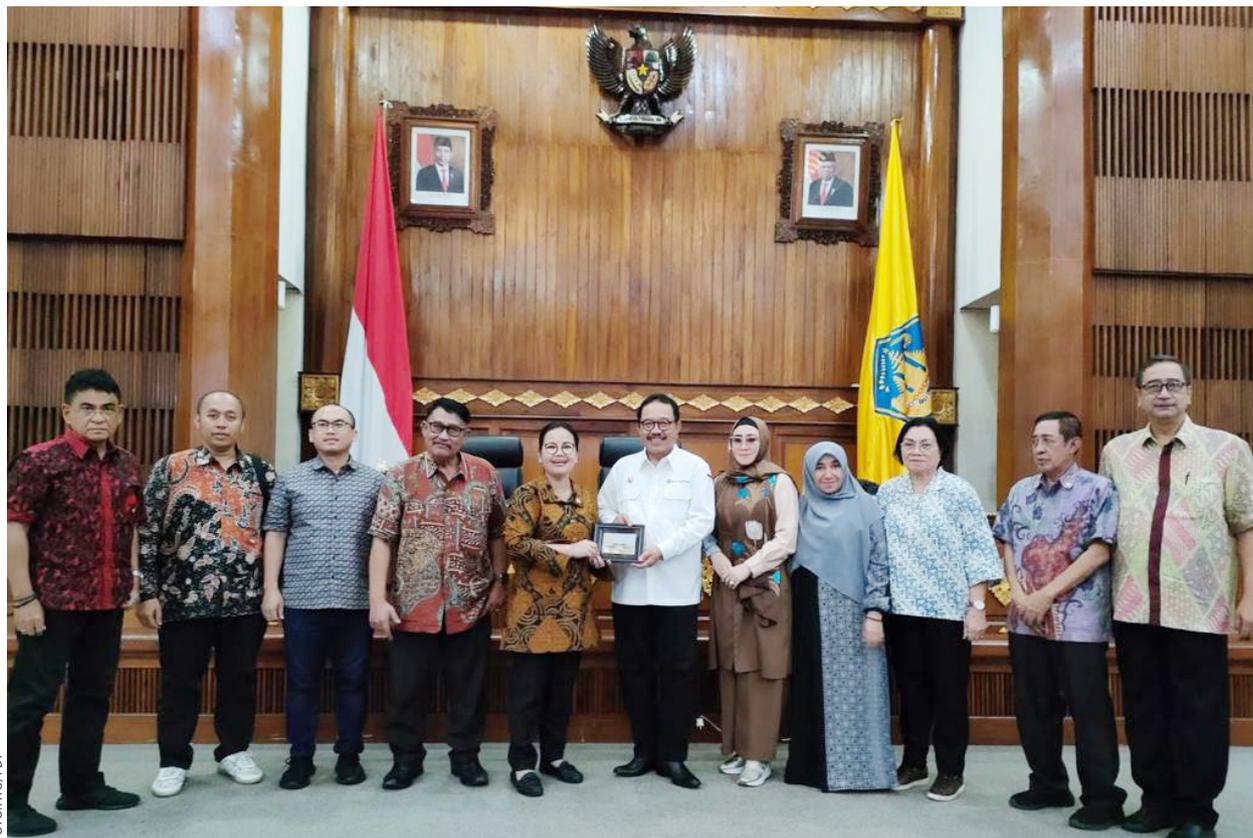


FOTO:AYU/PDI

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti saat bertukar cenderamata usai pertemuan dengan Wakil Gubernur Bali, Tjok Oka Ardhana Sukawati, di Kantor Gubernur Bali, Jumat (17/2/2023).

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti mengungkapkan pariwisata harus menjadi urusan yang wajib dibenahi dan dimajukan. Oleh karenanya, Komisi X dan pemerintah tengah berupaya merevisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan.

"Dalam bidang kepariwisataan, Indonesia harus bergegas. Karena negara lain juga sedang berpacu membenahi sektor pariwisata. Hal ini penting dalam RUU kepariwisataan yang tengah Komisi X DPR RI bahas bersama pemerintah, yakni

perjuangan untuk menjadikan pariwisata sebagai urusan yang wajib," ungkapnya dalam pertemuan dengan Wakil Gubernur Bali, Tjok Oka Ardhana Sukawati, di Kantor Gubernur Bali, Jumat (17/2).

Dilanjutkan Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini, dengan menjadikan pariwisata sebagai urusan yang wajib, maka sektor pariwisata akan memperoleh perhatian lebih besar lagi. Khususnya, dalam kaitan dengan pengembangan sektor pariwisata juga akan semakin optimal.

"Bali menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia. Oleh karenanya sangat berkepentingan terhadap revisi UU Kepariwisataan ini.

Karena itu kami berharap masukan dari Pemerintah Provinsi Bali dan stakeholder terkait di dalamnya," tambahnya.

Dalam kesempatan itu Cok Ace, begitu Tjok Oka Ardhana Sukawati biasa disapa, mengapresiasi kunjungan Komisi X DPR RI dalam masa resesnya kali ini. Terkait sektor pariwisata, pihaknya berkomitmen akan terus melaksanakan kebijakan atau regulasi dari pemerintah pusat. Meski demikian Cok Ace juga tak menampik masih ada sejumlah persoalan yang menyangkut implementasi regulasi pusat di daerah yang masih membutuhkan evaluasi dan penyesuaian.

ayu/aha

Scan QR untuk berita selengkapnya



Pemberian Pupuk Gratis Bagi Petani Dapat Jadi Solusi Peningkatan Kesejahteraan di DIY

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI My Esti Wijayati mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2022, angka kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tertinggi se-Pulau Jawa. Untuk itu, menurutnya diperlukan sinergitas yang baik dari pemangku kepentingan untuk mengentaskan kemiskinan.

"Perlu adanya sinergitas dan koordinasi yang baik daripada pemangku kepentingan, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, duduk bersama memberikan solusi bagaimana cara mengentaskan kemiskinan agar DIY tidak lagi ada predikat daerah yang

angka kemiskinan tertinggi se-Jawa," ungkapnya usai melakukan pertemuan dengan pertemuan dengan Kepala Kanwil

”

SALAH SATUNYA DENGAN MEMBERIKAN SUBSIDI PUPUK, NAMUN JIKA BERBICARA SUBSIDI PUPUK TIDAK HANYA DI YOGYAKARTA SAJA. HARUS ADA PEMBICARAAN KHUSUS UNTUK PETANI YANG PERLU KITA LAKUKAN BISA DARI SUBSIDI APBD.

Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi DIY beserta pejabat terkait lainnya di Ruang Pertemuan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal dan Pajak DIY, Selasa (13/2).

Diketahui, sebanyak 51 persen kemiskinan di DIY berada di sektor pertanian dan daerah yang kemiskinan tertinggi berada di Gunung Kidul dan Kulon Progo. Dengan demikian, menurut My Esti harus ada jalan keluar untuk mengatasi kemiskinan tersebut.

"Salah satunya dengan memberikan subsidi pupuk, namun jika berbicara subsidi pupuk tidak hanya di Yogyakarta saja. Harus ada pembicaraan khusus untuk petani yang perlu kita lakukan bisa dari subsidi APBD. Atau dengan cara memberi pupuk gratis. Diharapkan melalui pemberian pupuk secara gratis pendapatan bisa naik, dapat memberikan ruang kesejahteraan kepada para petani," Legislator Dapil DIY itu.

Politisi PDI-Perjuangan itu mengatakan, pihaknya (DPR) telah berupaya agar seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat maupun daerah dapat melakukan pendekatan dari seluruh sektor dalam mengentaskan kemiskinan.

"Jadi saya berharap memang seluruh pemegang kebijakan di wilayah ini termasuk pemerintah pusat, dan pemerintah daerah perlu adanya sinergitas yang baik. Pasalnya jika dilihat dari segi anggarannya sudah cukup tinggi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sudah di atas Rp5 triliun," urai My Esti. [rni/aha](#)



FOTO: RSB/PDI

Anggota Banggar DPR RI My Esti Wijayati saat mengikuti pertemuan di Ruang Pertemuan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal dan Pajak DIY, Selasa (13/2/2023).

Scan QR untuk berita selengkapnya



Terima Delegasi Parlemen Uni Eropa, DPR Bahas Terkait Pembatasan Kelapa Sawit



Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menerima kunjungan Parlemen Uni Eropa di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/2/2023).

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menerima kunjungan Parlemen Uni Eropa di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/2). Kunjungan ini membahas berbagai macam permasalahan global, energi terbarukan hingga agenda politik Indonesia menjelang Pemilihan Umum 2024.

Selain itu, dibahas pula persoalan terkait perdagangan kelapa sawit yang merupakan salah satu komoditas ekspor utama Indonesia yang mengalami pembatasan karena kekhawatiran atas isu deforestasi.

"Jadi memang diskusinya sangat luas. Tetapi kita selalu menerima delegasi dari Parlemen Eropa ini, dari

banyak komisi mereka juga sering hadir setahun bisa 2-3 kali ya mungkin lebih. Dan saya kira ini adalah satu hal yang sangat positif, artinya mereka mempunyai perhatian lebih ke kawasan ASEAN dan khususnya pada Indonesia. Dan selalu kita terima di

”

JADI INI ADALAH TUGAS DIPLOMASI BAIK ITU DARI PEMERINTAH, NEGARA MAUPUN DARI DPR DAN JUGA MASYARAKAT INDONESIA LAINNYA DAN TERUTAMA JUGA DARI PARA SWASTA YANG BERKIPRAH DI BIDANG INI.

DPR RI oleh BKSAP," ujar Fadli Zon kepada Parlemen usai acara.

Dalam bidang ekonomi, pertemuan ini membahas mengenai persoalan pembatasan ekspor kelapa sawit karena aspek deforestasi dan kesehatan. Kampanye hitam terkait deforestasi ini tidak dapat dipungkiri lantaran terjadi banyaknya kebakaran hutan di Indonesia pada masa lalu. Terkait Kesehatan, *saturated fat* yang dinilai membuat kelapa sawit berbahaya juga ditemukan di produk lainnya seperti keju, coklat, dan sebagainya.

Kasus kebakaran hutan di Indonesia sendiri dalam beberapa tahun ini telah mengalami penurunan. Oleh karena itu, Politisi Fraksi Partai Gerindra itu pun menolak alasan lingkungan hidup yang menjadi hambatan dalam Indonesia melakukan ekspor kelapa sawit. Ia pun menilai butuh diplomasi dari berbagai pihak mulai dari pemerintah, parlemen maupun pihak swasta untuk mengatasi persoalan ekspor minyak kelapa sawit ini.

"Saya kira pada umumnya mereka sudah banyak kemajuan tetapi kan tentu ada politiknya juga di situ ya. Ada juga negara-negara tertentu yang ingin memproteksi atau melindungi kepentingan para petani bunga matahari karena bersaing ya minyaknya mereka dengan minyak kelapa sawit kita. Jadi ini adalah tugas diplomasi baik itu dari pemerintah, negara maupun dari DPR dan juga masyarakat Indonesia lainnya dan terutama juga dari para swasta yang berkiprah di bidang ini," pungkasnya.

gal/aha

Scan QR untuk berita selengkapnya





Seminar Nasional Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (Puspanlak UU) Badan Keahlian (BK) terkait sistem kesehatan di Serpong, Tangerang Selatan, Senin (27/02/2023).
FOTO: PRIMA



Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon saat kembali dipercaya dan terpilih menjadi Ketua Organisasi Parlemen Asia Tenggara Anti Korupsi atau SEAPAC, untuk masa jabatan 2023-2025. FOTO: ANE/PDT



Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar foto bersama usai acara pelepasan pensiunan Setjen DPR RI di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (28/2/2023). FOTO: RSB/PDT